CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Bab. I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana perangkat daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban perangkat daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan perangkat daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan:

a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran
b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan perangkat daerah serta hasil yang telah dicapai.
d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana perangkat daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi perangkat daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan perangkat daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahan-perubahannya;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.

IV. Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos keuangan daerah, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan akun-akun laporan keuangan, dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsilisasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

VI. Penjelasan Informasi Non Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

VII. Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional khususnya di bidang ekonomi dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bantul tahun 2020 tercatat Rp 26.162,54 milyar turun 0,57% dari tahun 2019 yang sebesar Rp 26.311,58 milyar dengan distribusi terbesar dari sektor industri pengolahan kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sedangkan berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian Kabupaten Bantul tahun 2020 turun sebesar 1,66% lebih rendah dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,53% (BPS, 2021).

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi. Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yang juga dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
3. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui kas daerah Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
4. Semua belanja Dinas dianggarkan pada APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dialokasikan berdasarkan urusan, program dan kegiatan kepada perangkat daerah sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dinas Pertanahan dan

Tata Ruang merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang secara teknis menangani dan mengelola berbagai program kegiatan di bidang Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melaksanakan 7 program sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
d. Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
e. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;
f. Program Perencanaan Tata Ruang;
g. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Realisasi pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Target Kinerja DPTR Tahun Anggaran 2020

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Capaian nilai AKIP**		**82**	**81,04**	**98,03**
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jenis ATK	Jenis	44	48	109,09
	Jumlah alat istrik dan elektonika	Jenis	11	11	100
	Jumlah materai	Lembar	480	491	102,29
	Jenis peralatan kebersihan	Jenis	19	23	121,05
	Jumlah pengisian tabung gas	Kali	6	6	100
	Jumlah pembayaran telepon, air, listrik, internet, surat kabar, sampah	Kali	12	12	100

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	Pengadaan spanduk publikasi	Unit	4	4	100
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas dalam daerah	OH	157	157	100
	Perjalanan Dinas luar daerah	OH	23	13	56,52
	Laporan hasil rapat	laporan	20	22	110
	Jumlah Jamuan Tamu	orang	100	649	649
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa tenaga kontrak	ob	144	144	100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana**	**persentase**	**100**	**100**	**100**
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	Unit	2	2	100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku cadang kendaraan dan servis	Unit	19	17	89,47
	Pembayaran pajak kendaraan dinas	unit	19	17	89,47
	Bahan bakar minyak	Liter	5.962	7.020	117,75
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5	5	100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Nilai Evaluasi kinerja**	**nilai**	**85**	**83,45**	**98,18**
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Jasa pengelola keuangan dan kepegawaian	ob	168	167	99,40
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**persentase**	**96**	**100,53**	**104,72**
Inventarisasi tanah kas desa	database tanah dsa ter update	bidang	-	-	-
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Dokumen pendaftaran tanah	dokumen	1	1	100
	Dokumen pemberkasan tanah	dokumen	5	4	80

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Pemanfaatan Tanah SG	Rekomendasi pemanfatan SG	dokumen	-	-	-
Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Pendaftaran tanah SG	Bidang	500	395	79
	Pemberkasan tanah kasultanan untuk tahun 2021	Berkas / dokumen	500	500	100
	Pengadaan patok tanah desa	Patok	5250	5250	100
	Pemasangan patok tanah desa di 10 desa	Bidang	1000	1000	100
	Sket bidang tanah desa	Bidang	1000	1000	100
	Permberkasan bidang tanah desa	Bidang	1000	1000	100
	Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	Sertifikat	50	50	100
Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Rekomendasi kepastian hukum penggunaan tanh kasultanan dan tanah kadipaten di Kabupaten Bantul	Rekomendasi	20	22	110
	Raperdes tentang pemanfaatan tanah desa	Dokumen raperdes	43	43	100
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Bantul	Buah scanner	1	1	100
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	**Angka penanganan Konflik Pertanahan**	**Angka**	**15**	**15**	**100**
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	penyelesaian konflik pertanahan	Kasus	5	5	100
Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah desa dan tanah kadipaten	penanganan permasalahan tanah desa	desa	5	5	100
Program Perencanaan Tata Ruang	**Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan**	**Dokumen**	**4**	**2**	**50**
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Raperda RTRW	Dokumen	1	1	100
	KLHS RTRW	Dokumen	1	1	100

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR Perdesaan	Dokumen	2	2	100
Studi tentang tata ruang	Dokumen studi review Perbub Sempadan	dokumen	-	-	-
Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen rencana induk satuan ruang strategis Pantai samas-parangtritis	dokumen	-	-	-
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis	dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Giriloyo)	dokumen	1	1	100
	dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Banyusumurup)	dokumen	1	1	100
	dokumen perencanaan pada SRS imogiri (RTBL kawasan Segoroyoso)	dokumen	1	1	100
	Dokumen RTBL kawasan Masjid Pathok Nagoro	dokumen	1	1	100
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang**	**Persentase**	**77**	**77**	**100**
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Konsolidasi Tanah	Bidang	115	113	98,26
	Audit pemanfaatan tanah (Banguntapan, Kasihan, Sewon)	dokumen	-	-	-
Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang	Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	Peta	3	3	100
	Publikasi pemanfaatan ruang	kali	-	-	-
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Dokumen	-	-	-
	Digitalisasi audit pemanfaatan ruang	Dokumen	-	-	-
	Rancangan Fasad	Dokumen	-	-	-
	Fasilitasi pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang	desa	21	21	100

Sumber : DPTR, 2020

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ruang lingkup ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan meliputi pos pendapatan dan belanja yang terdapat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

Tidak terdapat target pada pos pendapatan dikarenakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tidak memiliki pos pendapatan yang menjadi sumber bagi pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada pos belanja, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki total pagu anggaran sebesar Rp 9.591.652.701,- dengan realisasi 88,61% atau mencapai Rp 8.499.033.492,- yang terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung.

   Belanja Tidak Langsung merupakan belanja gaji pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

   a) Belanja Pegawai dengan pagu Rp 3.001.286.689,- dengan realisasi Rp 2.562.208.797,- atau 85,37%.
2. Belanja Langsung.

   Belanja Langsung ini terdiri atas :

   a) Belanja Pegawai dengan pagu Rp 612.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp 605.285.000,- atau 98,76%.
   b) Belanja Barang dan Jasa dengan pagu Rp 5.959.671.012,- dengan realisasi sebesar Rp 5.313.714.695,- atau 89,16%.

c) Belanja Modal dengan pagu Rp 17.825.000,- dengan realisasi sebesar Rp 17.825.000,- atau 100%.

Tabel 2. Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Berdasar Kelompok dan Jenis Belanja APBD TA 2020

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Tidak Langsung	**3.001.286.689**	**2.562.208.797**	**85,37**	**439.077.892**	**14,63**
Belanja Pegawai	3.001.286.689	2.562.208.797	85,37	439.077.892	14,63
Belanja Langsung	**6.590.366.012**	**5.936.824.695**	**90,08**	**653.541.317**	**9,92**
Belanja Pegawai	612.870.000	605.285.000	98,76	7.585.000	1,24
Belanja Barang dan Jasa	5.959.671.012	5.313.714.695	89,46	645.956.317	10,54
Belanja Modal	17.825.000	17.825.000	100	-	0
	9.591.652.701	**8.499.033.492**	**88,61**	**1.092.619.209**	**11,39**

Sumber : DPTR, 2020

Belanja Langsung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dianggarkan dalam program/kegiatan selama satu tahun anggaran 2020 dengan rincian berikut :

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang TA 2020

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**615.736.112**	**561.495.413**	**91,19**	**54.240.699**	**8,81**
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	173.947.000	162.609.427	93,48	11.337.573	6,52
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	122.189.272	79.969.100	65,45	42.220.172	34,55
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	319.599.840	318.916.886	99,78	682.954	0,22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**144.112.000**	**143.379.101**	**99,49**	**732.899**	**0,51**

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)	%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.254.000	31.242.000	99,96	12.000	0,04
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	93.858.000	93.137.101	99,23	720.899	0,77
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	19.000.000	100	-	-
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	-	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**51.720.000**	**44.360.000**	**85,77**	**7.360.000**	**14,23**
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	51.720.000	44.360.000	85,77	7.360.000	14,23
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	**3.759.761.900**	**3.310.630.695**	**88,05**	**449.131.205**	**11,95**
Inventarisasi tanah kas desa	5.300.000	5.300.000	100	-	-
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	7.225.000	6.554.120	90,71	670.880	9,29
Pemanfaatan Tanah SG	62.148.000	62.148.000	100	-	-
Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	3.453.156.900	3.004.697.075	87,01	448.459.825	12,99
Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanna dan kadipaten	214.107.000	214.106.500	99,99	500	0,01
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan	17.825.000	17.825.000	100	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)	%
keistimewaan (pertanahan)					
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	**186.162.500**	**185.937.500**	**99,88**	**225.000**	**0,12**
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	13.550.000	13.550.000	100	-	-
Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten	172.612.500	172.387.500	99,87	225.000	0,13
Program Perencanaan Tata Ruang	**1.211.635.500**	**1.205.462.600**	**99,49**	**6.172.900**	**0,51**
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	198.775.000	198.332.000	99,78	443.000	0,22
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	170.700.000	170.700.000	100	-	-
Studi tentang Tata Ruang	9.450.000	9.450.000	100	-	-
Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis	832.710.500	826.980.6000	99,31	5.729.900	0,69
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	**621.238.000**	**485.559.386**	**78,16**	**135.678.614**	**21,84**
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	423.538.000	287.869.386	67,97	135.658.614	32,03
Pengembangan data pemanfaatan ruang	149.300.000	149.290.000	99,99	10.000	0,01
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	48.400.000	48.400.000	100	-	-
	6.590.366.012	**5.936.824.695**	**90,08**	**653.541.317**	**9,92**

Sumber : DPTR, 2020

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Secara umum hal yang menjadi kendala dalam hal realisasi belanja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini adalah :

1) Kurang optimal dalam perencanaan sehingga kegiatan tidak memenuhi jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2) Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM selaku subjek pelaksana.

   Sebagai pelaksana, SDM atau aparatur pelaksana harus memiliki kualifikasi standar sebagai suatu subjek tetapi dengan kelemahan kualitas sangat berpengaruh terhadap jalannya program kegiatan. Di satu sisi jumlah SDM sangat menunjang kelancaran dan penyelesaian tugas, dengan penetapan target diatas kemampuan secara kualitas maupun jumlah tentu menyebabkan target pencapaian tidak terpenuhi. Disisi lain adanya pembatasan kebijakan keuangan dalam mendukung dan mengakomodir beban kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti diklat, bimbingan teknis dan sejenisnya.

3) Perubahan atas tatanan kerja, implementasi peraturan-peraturan baru dan penerapan aplikasi berbasis komputer.

   Perubahan atas tatanan kerja, implementasi peraturan-peraturan baru dan penerapan aplikasi berbasis komputer perlu disosialisasikan dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan yang ada sehingga selaras dan tidak menjadi penghambat bagi administrasi pelaksana dalam sistem pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai perangkat daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

a. Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara

pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh OPD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarsasi fisik (*stock opname*).

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap.

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah:

- Tanah
- Gedung dan bangunan
- Aset tetap lainnya
- Akumulasi Penyusutan
- Peralatan dan mesin
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Konstruksi dalam Pengerjaan

e. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari :

- Tagihan Piutan Penjualan Angsuran
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- Aset Tak Berwujud
- Aset Tetap Lain-lain
- Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

f. Kewajiban

Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga
- Utang bunga
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

g. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan.

Bab. V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Belanja Daerah dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan tujuan melayani kepentingan umum dan masyarakat yang terakomodir dalam bentuk belanja kebutuhan rutin perkantoran maupun program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah maka Belanja perangkat daerah dibagi atas Belanja sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Belanja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 2019 dan 2020

	TA 2019			TA 2020		
BELANJA	**PAGU ANGGARAN**	**REALISASI**	**%**	**PAGU ANGGARAN**	**REALISASI**	**%**
Belanja Operasi	**6.789.488.764**	**6.289.016.925**	**92,63**	**9.573.827.701**	**8.481.208.492**	**88,59**
Belanja pegawai	3.359.889.221	3.205.331.236	95,40	3.614.156.689	3.167.493.797	87,64
Belanja barang	3.429.599.543	3.083.685.689	89,91	5.959.671.012	5.313.714.695	89,16
Belanja Modal	**772.687.500**	**659.789.950**	**85,29**	**17.825.000**	**17.825.000**	**100**
Belanja modal	772.687.500	659.789.950	85,29	17.825.000	17.825.000	100
	7.562.176.264	**6.948.803.875**	**91.89**	**9.591.652.701**	**8.499.033.492**	**88,61**

Sumber : DPTR, 2020

Dari besaran pagu belanja 2020 terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 2.029.476.437 atau 26,84% dibanding tahun 2019 dengan realisasi yang juga mengalami penurunan sebesar 3,57 %.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai merupakan elemen

Belanja operasional yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan tunjangan, honorarium PNS dan honorarium Non PNS. Capaian belanja pegawai tahun anggaran 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	**3.001.286.689**	**2.562.208.797**	**85,37**	**439.007.298**	**14,63**
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.332.447.039	2.032.456.180	87,14	299.990.859	12,86
Tunjangan Keluarga	227.438.401	179.643.096	78,99	47.795.305	21,01
Tunjangan Jabatan	170.445.000	170.445.000	100	-	-
Tunjangan Fungsional	4.200.000	-	0	4.200.000	100
Tunjangan Fungsional Umum	90.412.000	61.375.000	67,88	29.037.000	32,12
Tunjangan Beras	133.247.040	94.435.680	70,87	38.811.360	29,13
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.627.765	7.164.825	33,13	14.462.940	66,87
Pembulatan Gaji	36.658	24.832	67,74	11.826	32,26
Iuran Jaminan Kecelakan Kerja	5.358.196	4.166.021	77,75	1.192.175	22,25
Iuran Jaminan Kematian	16.074.590	12.498.163	77,75	3.576.427	22,25
Honorarium PNS	**262.470.000**	**254.885.000**	**97,11**	**7.585.000**	**2,89**
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	206.875.000	206.650.000	99,89	225.000	0,11
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.875.000	3.875.000	100	-	-
Honor Pengelola Keuangan dan Barang	51.720.000	44.360.000	85,77	7.360.000	14,23
Honorarium Non PNS	**350.400.000**	**350.400.000**	**100**	**-**	**-**
Honorarium Tim Non PNS	43.800.000	43.800.000	100	-	-
Honorarium Pegawai Kontrak	306.600.000	306.600.000	100	-	-
	3.614.156.589	**3.167.493.797**	**87,64**	**446.662.792**	**12,36**

Sumber : DPTR, 2020

Belanja barang dan jasa disediakan untuk mengakomodir kebutuhan/biaya yang diperlukan bagi belanja program/kegiatan baik yang bersifat pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan maupun meningkatkan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat. Realisasi atas belanja barang dan jasa tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Bahan Pakai Habis	**122.630.000,00**	**122.629.500,00**	**100,00**	**500,00**	**0,00**
Belanja Alat Tulis Kantor	102.612.000,00	102.611.500,00	100,00	500,00	0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.586.000,00	4.586.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	2.328.000,00	2.328.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.204.000,00	12.204.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Bahan/Material	**268.954.000,00**	**268.599.675,00**	**99,87**	**354.325,00**	**0,13**
Belanja Bahan Baku Bangunan	16.127.000,00	16.120.000,00	99,96	7.000,00	0,04
Belanja Pilar	240.867.000,00	240.519.675,00	99,86	347.325,00	0,14
Belanja alat-alat/perlengkapan	11.960.000,00	11.960.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	**2.616.313.900,00**	**2.085.088.333,00**	**79,70**	**531.225.567,00**	**20,30**
Belanja Telepon	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	100,00
Belanja Air	0,00	0,00	-	0,00	-
Belanja Listrik	50.400.000,00	41.626.099,00	82,59	8.773.901,00	17,41
Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.600.000,00	13.516.328,00	86,64	2.083.672,00	13,36
Belanja Sertifikasi	1.605.688.900,00	1.085.800.906,00	67,62	519.887.994,00	32,38
Belanja Transportasi dan Akomodasi	928.345.000,00	928.345.000,00	100,00	0,00	0,00

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Publikasi	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	0,00	0,00	-	0,00	-
Belanja Premi Asuransi	**12.999.840,00**	**12.316.886,00**	**94,75**	**682.954,00**	**5,25**
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	12.999.840,00	12.316.886,00	94,75	682.954,00	5,25
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	**93.858.000,00**	**93.137.101,00**	**99,23**	**720.899,00**	**0,77**
Belanja Jasa Service	11.150.000,00	11.150.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	21.790.000,00	21.789.201,00	100,00	799,00	0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	53.658.000,00	53.658.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Jasa KIR	160.000,00	155.700,00	97,31	4.300,00	2,69
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.100.000,00	6.384.200,00	89,92	715.800,00	10,08
Belanja Cetak dan Penggandaan	**69.623.000,00**	**69.623.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Cetak	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	60.373.000,00	60.373.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	**76.500.000,00**	**70.500.000,00**	**92,16**	**6.000.000,00**	**7,84**
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	9.000.000,00	60,00	6.000.000,00	40,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	**8.400.000,00**	**5.700.000,00**	**67,86**	**2.700.000,00**	**32,14**
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	5.700.000,00	67,86	2.700.000,00	32,14
Belanja Makanan dan Minuman	**198.162.500,00**	**194.001.000,00**	**97,90**	**4.161.500,00**	**2,10**
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	82.402.500,00	78.241.000,00	94,95	4.161.500,00	5,05
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan	112.260.000,00	112.260.000,00	100,00	0,00	0,00

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Minuman Pelaksanaan Kegiatan					
Belanja Makanan dan Minuman	**198.162.500,00**	**194.001.000,00**	**97,90**	**4.161.500,00**	**2,10**
Belanja Perjalanan Dinas	**174.769.272,00**	**108.836.600,00**	**62,27**	**65.932.672,00**	**37,73**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.880.000,00	60.160.000,00	71,72	23.720.000,00	28,28
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.889.272,00	48.676.600,00	53,56	42.212.672,00	46,44
Belanja Pemeliharaan	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi	**910.610.500,00**	**904.437.600,00**	**99,32**	**6.172.900,00**	**0,68**
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	-	0,00	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	825.610.500,00	819.880.600,00	99,31	5.729.900,00	0,69
Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajeman Mutu	0,00	0,00	-	0,00	-
Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	85.000.000,00	84.557.000,00	99,48	443.000,00	0,52
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	**1.255.850.000,00**	**1.228.095.000,00**	**97,79**	**27.755.000,00**	**2,21**
Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	709.650.000,00	683.000.000,00	96,24	26.650.000,00	3,76
Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG	0,00	0,00	-	0,00	-
Jasa Tenaga Harian Lepas	15.127.000,00	15.122.000,00	99,97	5.000,00	0,03
Jasa Petugas Pengumpul/Validasi Data	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Jasa Petugas Lapangan	432.073.000,00	430.973.000,00	99,75	1.100.000,00	0,25
Jasa Narasumber,	**1.255.850.000,00**	**1.228.095.000,00**	**97,79**	**27.755.000,00**	**2,21**

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan					
Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta	**124.000.000,00**	**123.750.000,00**	**99,80**	**250.000,00**	**0,20**
Belanja Jasa Transport Peserta	124.000.000,00	123.750.000,00	99,80	250.000,00	0,20

Sumber : DPTR, 2020

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan Belanja yang digunakan untuk pengadaan barang daerah yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun anggaran, yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, jalan irigasi jaringan, bangunan, dan aset lainnya yang dikategorikan menambah aset daerah. Pada Tahun 2020 belanja modal yang di anggarkan adalah belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal pengadaan asset tetap lainnya. Realisasi secara rinci disajikan dalam table berikut:

Tabel 7. Realisasi Belanja Modal TA 2020

KELOMPOK BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	**17.825.000**	**17.825.000**	**100**	**0**	**0**
Pengadaan Personal Komputer	17.825.000	17.825.000	100	0	0
	17.825.000	**17.825.000**	**100**	**0**	**0**

Sumber : DPTR, 2020

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

5.2.1. Beban

Jumlah beban Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Batul periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Beban Operasi Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	**Beban Pegawai - LO**	**2.606.008.797,00**
	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	**2.562.208.797,00**
	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.032.456.180,00
	Beban Tunjangan Keluarga - LO	179.643.096,00
	Beban Tunjangan Jabatan - LO	170.445.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional - LO	0,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	61.375.000,00
	Beban Tunjangan Beras - LO	94.435.680,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	7.164.825,00
	Beban Pembulatan Gaji - LO	24.832,00
	Beban Iuran Asuransi Jaminan Kecelakan Kerja - LO	4.166.021,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian - LO	12.498.163,00
	Beban Honorarium Pegawai Non PNS	**43.800.000,00**
	Beban Honorarium Pegawai Non PNS	43.800.000,00
2	**Beban Barang dan Jasa**	**5.817.512.897,00**
	Beban Bahan Pakai Habis	**121.627.500,00**
	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	103.062.500,00
	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.586.000,00
	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.448.000,00
	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.392.000,00
	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	900.000,00
	Beban Persediaan Lainnya	(1.761.000,00)
	Beban Persediaan Bahan/ Material	**268.599.675,00**
	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	16.120.000,00
	Beban Persediaan Pilar	240.519.675,00
	Beban Persediaan Alat-alat/Perlengkapan	11.960.000,00
	Beban Jasa Kantor	**2.082.403.535,00**
	Beban Jasa listrik	38.941.801,00
	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00

No	Uraian	Jumlah
	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	13.515.828,00
	Beban Jasa Sertifikasi	1.085.800.906,00
	Beban Transportasi dan Akomodasi	928.345.000,00
	Beban Jasa Publikasi	14.000.000,00
	Beban Premi Asuransi	**12.316.886,00**
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	12.316.886,00
	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	**93.137.101,00**
	Beban Jasa Service	11.150.000,00
	Beban Penggantian Suku Cadang	21.789.201,00
	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	53.658.000,00
	Beban Jasa KIR	155.700,00
	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	6.384.200,00
	Beban Cetak dan Penggandaan	**69.623.000,00**
	Beban Cetak	9.250.000,00
	Beban Penggandaan	60.373.000,00
	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	**16.500.000,00**
	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	9.000.000,00
	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00
	Beban Sewa Tempat/Lahan Pertanian	(54.000.000,00)
	Beban Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk	60.000.000,00
	Beban Sewa Sarana Mobilitas	**5.700.000,00**
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.700.000,00
	Beban Makanan dan Minuman	**194.001.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	78.241.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Tamu	3.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	112.260.000,00
	Beban Perjalanan Dinas	**108.836.600,00**
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.160.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.676.600,00
	Beban Pemeliharaan	**27.000.000,00**
	Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00
	Beban Jasa Konsultasi	**904.437.600,00**
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	819.880.600,00
	Beban Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Lingkungan	84.557.000,00
	Beban Honorarium PNS - LO	**254.885.000,00**
	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	206.650.000,00
	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	3.875.000,00
	Beban Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	44.360.000,00
	Beban Honorarium Non PNS - LO	**306.600.000,00**
	Beban Honorarium Pegawai Kontrak	306.600.000,00
	Beban Jasa	**1.351.845.000,00**
	Beban Jasa Narasumber / Moderator / Tenaga Ahli	683.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Harian Lepas	15.122.000,00

No	Uraian	Jumlah
	Beban Jasa Pengumpul/Validasi Data	99.000.000,00
	Beban Jasa Petugas Lapangan	430.973.000,00
	Beban Jasa Transport Peserta	123.750.000,00
3	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**205.330.316,46**
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	**189.926.193,46**
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	189.926.193,46
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**44.694.123,00**
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.694.123,00
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**(29.290.000,00)**
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(29.290.000,00)
	Jumlah	**8.628.852.010,46**

Sumber : DPTR, 2020

Surplus / Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan–LO dan Beban–LO. Nilai tersebut di atas bernilai negatif / defisit disebabkan tidak adanya Pendapatan–LO sedangkan terdapat Beban – LO sebesar Rp8.628.852.010,46

5.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Nilai ekuitas akhir merupakan hasil akhir dari nilai saldo awal ekuitas, adanya surplus / defisit-LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi mendasar dengan perincian sebagai berikut:

- Ekuitas awal	Rp 2.938.592.766,66
- Defisit LO	Rp (8.628.852.010,46)
- Aset / Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp 8.499.033.492,00
- Dampak kumulatif perubahan kebijakan / Kesalahan mendasar	Rp (214.245.700,00)

- Ekuitas Akhir	Rp 2.594.528.548,20

5.4. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1. Aset

Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.598.979.929,20 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Aset DPTR per 31 Desember 2019

No	Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lancar	30.759.000,00	55.761.000,00	25.002.000,00
2	Aset Tetap	2.897.989.945,66	2.543.218.929,20	(354.771.016,46,00)
3	Aset lainnya	16.980.000,00	0	(16.980.000,00)
	Jumlah	**2.945.728.945,66**	**2.598.979.929,20**	**(346.749.016,46)**

Sumber : DPTR, 2020

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 55.761.000,00 yang merupakan nilai persediaan akhir disajikan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020

Uraian	2019	2020	Kenaikan /Pengurangan
Kas di Bendahara Penerimaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)
Kas di Bendahara Penegeluaran	0,00	0,00	
Kas di Bendahara BLUD	0,00	0,00	
Kas di bendahara BOS	0,00	0,00	
Piutang Pajak	0,00	0,00	
Piutang Retribusi	0,00	0,00	
Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	

Uraian	2019	2020	Kenaikan /Pengurangan
Piutang lainnya	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	
Belanja dibayar di muka	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00
Persediaan	759.000,00	1.761.000,00	1.002.000,00
Jumlah	**30.759.000,00**	**55.761.000,00**	**25.002.000,00**

Sumber : DPTR, 2020

Pengelolaan persediaan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) dimana persediaan pertama yang masuk akan diperlakukan sebagai persediaan pertama yang dikeluarkan. Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dimana nilai persediaan akhir di neraca ditentukan dengan cara penghitungan fisik persediaan (*stok opname*) pada akhir periode yaitu per 31 Desember. Saldo Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Saldo persediaan per 31 Desember 2020

No	Uraian	2019	2020	Selisih
1	Persediaan ATK	451.000,00	0,00	(451.000,00)
2	Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)
3	Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	188.000,00	0,00	(188.000,00)
4	Persediaan lainnya	0,00	1.761.000,00	1.761.000,00
	Jumlah	**759.000,00**	**1.761.000,00**	**1.002.000,00**

Sumber : DPTR, 2020

5.4.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perbandingan nilai asset tetap disajikan sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Uraian	2019	2020	Penambahan/ Pengurangan
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.880.275.837,00	2.760.125.137,00	(120.150.700,00)
3	Gedung dan Bangunan	2.234.706.150,00	2.234.706.150,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.242.500,00	3.242.500,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**5.118.224.487,00**	**4.998.073.787,00**	**(120.150.700,00)**

Sumber : DPTR, 2020

Nilai Aset Tetap tahun 2020 diperoleh dari mutasi tambah dan mutasi hapus. Mutasi tambah berasal dari kegiatan pengadaan belanja modal tahun 2020 dan mutasi dari OPD lain yang kemudian diakui sebagai asset DPTR. Sedangkan mutasi hapus berasal dari kegiatan penghapusan asset karena asset yang dimiliki dianggap telah habis masa pakainya karena rusak atau jika dilakukan pemeliharaan memakan biaya yang tidak efisien atau karena sebab lain. Penambahan dan pengurangan nilai asset digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Uraian	2019	Mutasi		2020
			Tambah	Hapus	
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	2.880.275.837	26.533.000	146.683.700	2.760.125.137
3	Gedung dan Bangunan	2.234.706.150	0	0	2.234.706.150
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	3.242.500	0	0	3.242.500
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
	Jumlah	**5.118.224.487**	**26.533.000**	**146.683.700**	**4.998.073.787**

Sumber : DPTR, 2020

Nilai Buku Aset Tetap dicatat dan diakui per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.543.218.929,20. Nilai buku asset tetap diperoleh dari nilai asset

tetap 2020 dikurangi akumulasi penyusutan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020

No	Uraian	Nilai Aset Tetap		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.760.125.137,00	2.082.027.105,80	678.098.031,20
3	Gedung dan Bangunan	2.234.706.150,00	378.827.752,00	1.861.878.398,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.242.500,00	0,00	3.242.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**4.998.073.787,00**	**2.460.854.857,80**	**2.543.218.929,20**

Sumber : DPTR, 2020

5.4.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul posisi per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp 0,00 sebagai berikut:

Tabel 15. Aset Lainya per 31 Desember 2020

No	Uraian	2019	2020	Penambahan/ Pengurangan
1	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00
2	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
3	Aset tak berwujud	57.770.000,00	11.500.000,00	(46.270.000,00)
4	Akumulasi amortisasi asset tak berwujud	(31.820.000,00)	(11.500.000,00)	20.320.000,00
5	Aset lain-lain	0,00	0,00	0,00
6	Aset lain yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**25.950.000,00**	**0,00**	**(25.950.000,00)**

Sumber : DPTR, 2020

5.4.1.4. Kewajiban

Kewajiban yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2020 merupakan berasal dari nilai Kewajiban Jangka Pendek dengan rinisan sebagai berikut:

Tabel 16. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020

No	Uraian	2019	2020	Penambahan/ Pengurangan
1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
2	Utang bunga	0,00	0,00	0,00
3	Bagian lancar utang jangka panjang	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00
5	Utang belanja	7.136.179,00	4.451.381,00	2.684.798,00
6	Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Utang Uang Jaminan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**7.136.179,00**	**4.451.381,00**	**2.684.798,00**

Sumber : DPTR, 2020

5.4.1.5. Kewajiban dan Ekuitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp 2.598.979.929,20.

Bab VI. Penjelasan Informasi Non Keuangan

6.1. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti mandala Sarta Tata Sasana*) di dalamnya termuat kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berlokasi di Kompleks Pemda II Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul DI Yogyakarta 55714 telepon (0274) 367446.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
c. perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
d. penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : (1) Tanah Desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; (2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
e. penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
f. pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
g. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
h. penyusunan rencana rinci tata ruang;
i. penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;
j. penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis Kasultanan;
k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
l. pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;
m. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
n. pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
o. fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah Desa;
p. penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
q. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;

r. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
s. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
t. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
u. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Dinas;
v. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan tata ruang; dan
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

6.3. Struktur Organisasi

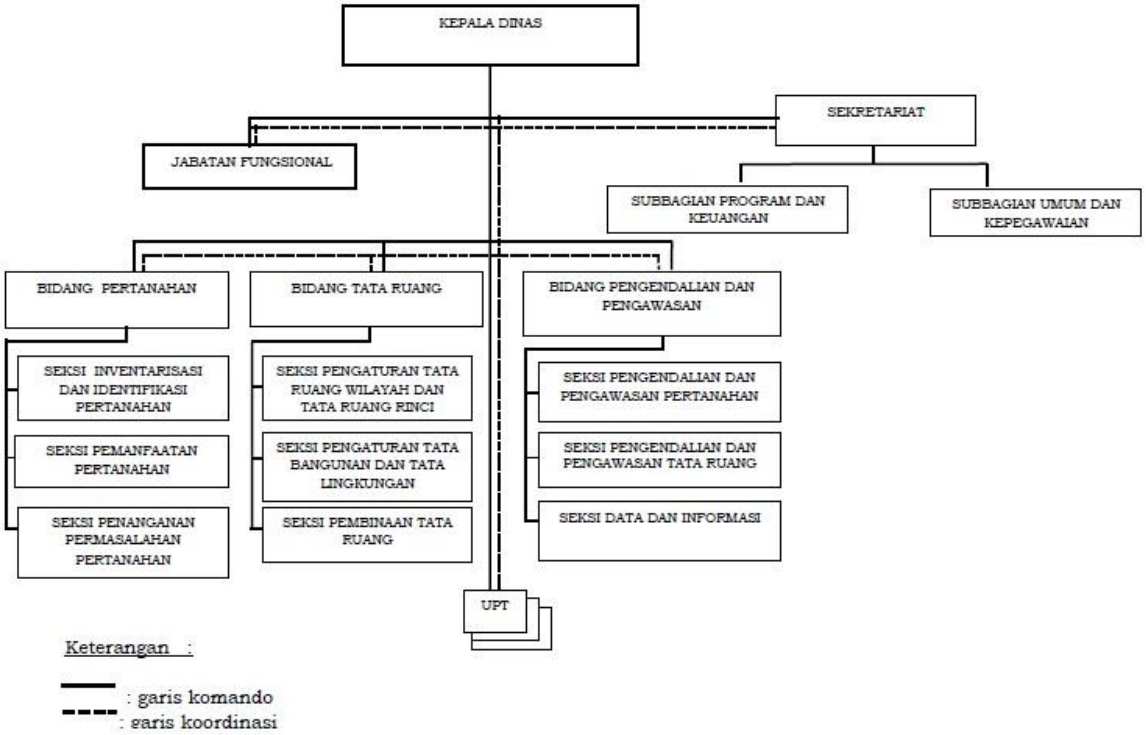

Sumber : Perda Bantul Nomor 8 Tahun 2019

6.4. Visi dan Misi

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul terkait

erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu "*Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana*".

Keterkaitan antara visi, misi kabupaten Bantul dengan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran

VISI **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran / IKU**
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	1. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)
			2. Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)
			3. Cakupan Sertifikasi Tanah(%)

Sumber : Renstra DPTR 2017-2021

6.5. Keragaman Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusai dalam penyelenggaraan urusan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan dalam table berikut:

Tabel 18. Data Pegawai Berdasar Jenis Kelamin per 31 Desember 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	28
2	Perempuan	111
		39

Sumber : DPTR, 2020

Proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan sebagai berikut.

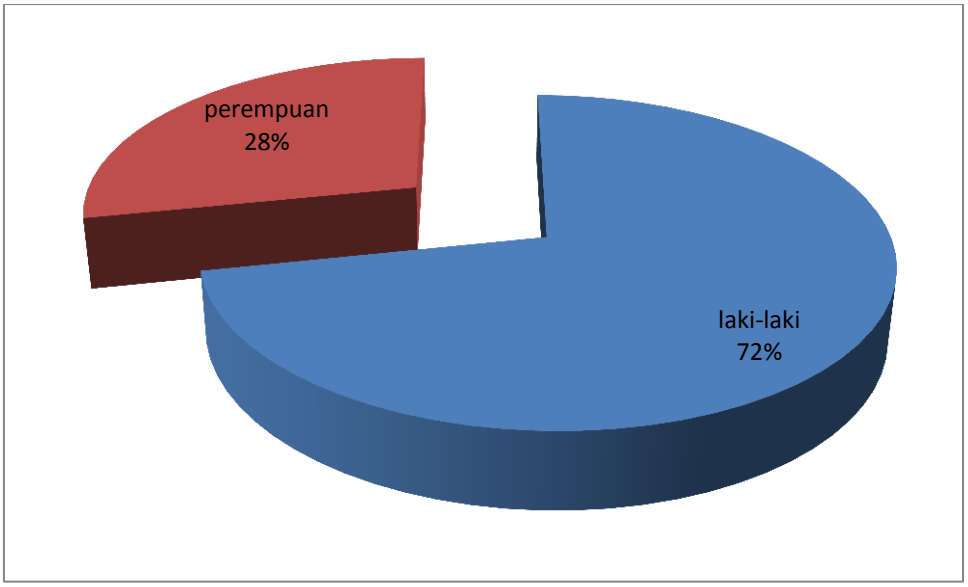

Sumber : DPTR, 2020

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Data Pegawai Berdasar Jenis Pendidikan per 31 Desember 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Magister	11
2	Sarjana	10
3	Diploma	4
4	SLTA	11
5	SLTP	2
6	SD	1
		39

Sumber : DPTR, 2020

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 28,21% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 25,64%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan

pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.

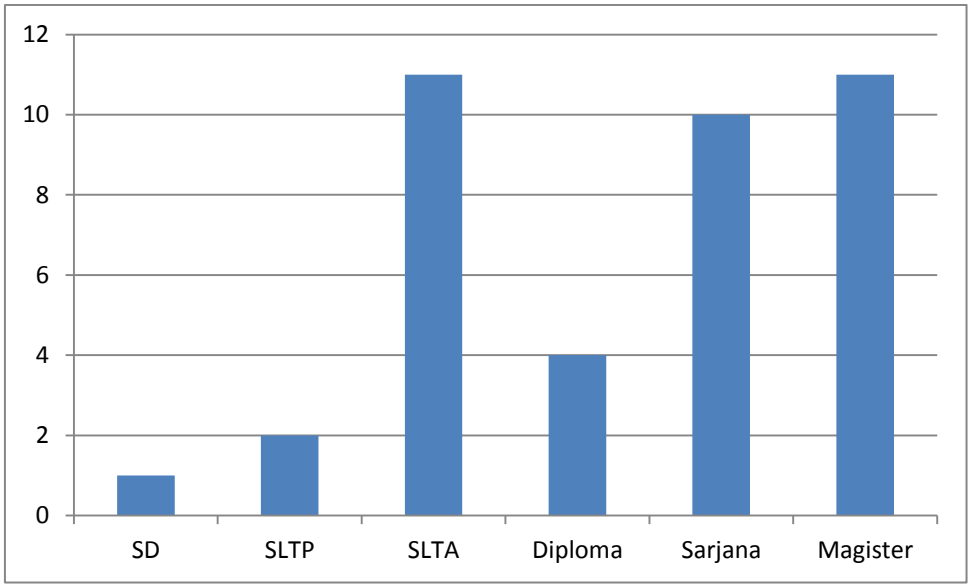

Sumber : DPTR, 2020

Bab VII. Penutup

Laporan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 secara keseluruhan.